

**PENGARUH KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI
TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:
FADILA ARIESTA
2008 / 05336**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI
TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

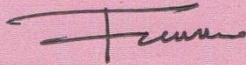
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)

Nama : Fadila Ariesta
BP/NIM : 2008/05235
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2012

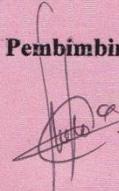
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



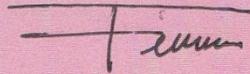
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Charoline Cheisvivanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Ketua Prodi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

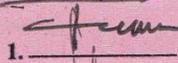
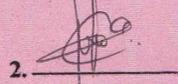
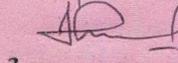
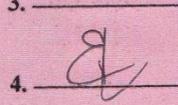
**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan
Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat)**

**Nama : Fadila Ariesta
Nim/BP : 05336 /2008
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi**

Padang, Januari 2013

Tim Penguji

<u>No.</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	2. 
3.	Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3. 
4.	Anggota	: Erly Mulyani SE, M.Si, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadila Ariesta
NIM/Thn. Masuk : 05336/2008
Tempat/Tgl Lahir : Kapar Selatan/24 Maret 1990
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Gunung Pangilun Kec. Padang Utara. Padang
No. HP/Telp : 087896000024
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis/dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah, apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 10 Desember 2012

atakan,

Fadila Ariesta
NIM. 2008/ 05336

ABSTRAK

Fadila Ariesta. 05279/2008. Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

**Pembimbing : I. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
II. Charoline Cheisviyanny, SE. M, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) Pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap keterandalan. (2) Pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap ketepatanwaktuan. (3) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan. (4) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan. (5) Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan.

Jenis penelitian ini digolongkan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat yang berjumlah 38 SKPD, yang terdiri dari kepala dan staf sub bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Metode pengumpulan data adalah dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap keterandalan, dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,382 > 1,672$ dengan nilai signifikansi $0,020 < \alpha 0,05$, dan nilai koefesien $\beta 0,080$ (H_1 diterima), (2) Pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap ketepatanwaktuan, dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,187 > 1,672$ dan nilai signifikansi $0,033 < \alpha 0,05$, dan nilai koefesien $\beta 0,264$ (H_2 diterima). (3) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan, dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,339 > 1,672$ dengan nilai signifikansi $0,023 < \alpha 0,05$, dan nilai koefesien $\beta 0,180$ (H_3 diterima). (4) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan, dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,278 > 1,672$ dengan nilai signifikansi $0,026 < \alpha 0,05$, dan nilai koefesien $\beta 0,283$ (H_4 diterima). (5) Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan, dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $5,486 > 1,672$ dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$, dan nilai koefesien $\beta 0,399$ (H_5 diterima).

Dalam penelitian ini disarankan bagi peneliti berikutnya supaya dapat melengkapi metode survei penelitian ini dengan wawancara, serta memperluas cakupan penelitian. Bagi instansi pemerintahan diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dalam hal pengelolaan keuangan dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki serta didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai agar menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang bernilai yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ” Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat) ”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak, dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE. M, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Pimpinan SKPD Kabupaten Pasaman Barat yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Teman-teman yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, November 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	15
1. Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	15
a. Pengertian Pelaporan Keuangan Pemerintah	15
b. Peran dan tujuan Pelaporan keuanagn pemerintah.....	16
c. Manfaat Laporan Keuangan.....	17
d. Entitas Pelaporan.....	17
e. Dasar hukum.....	18
2. Nilai Informasi.....	19
a. Pengertian Nilai Informasi.....	19
b. Unsur- unsur Nilai Informasi.....	22
3. Kualitas Sumberdaya Manusia	25
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi	29
a. Pengertian Teknologi Informasi.....	29

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi	30
5. Pengendalian Intern Akuntansi.....	33
a. Pengertian Pengendalian Intern Akuntansi	33
b. Unsur- unsur Pengendalian Intern Akuntansi	35
c. Tujuan Pengendalian Intern Akuntansi.....	39
B. Penelitian Terdahulu.....	40
C. Pengembangan Hipotesis	42
D. Kerangka Konseptual	47
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Populasi dan Sampel	50
1. Populasi	50
2. Sampel	52
C. Jenis dan Sumber Data	53
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Variabel Penelitian.....	54
F. Instrumen Penelitian.....	54
G. Uji Validitas dan Uji Reabilitas.....	56
H. Hasil Uji Coba Instrumen.....	58
I. Uji Asumsi Klasik.....	59
J. Teknik Analisis Data	60
K. Defenisi Operasional	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	67
B. Hasil Penelitian	68
C. Demografi Responden.....	69
D. Deskripsi Hasil Penelitian.....	72
E. Uji Instrumen Penelitian.....	79
F. Uji Asumsi Klasik.....	84
1. Uji Normalitas.....	85
2. Uji Heteroskedastisitas.....	86
3. Uji Multikoloniaritas.....	88
G. Uji Model Penelitian.....	90
H. Uji Hipotesis.....	97
I. Pembahasan	100

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	107
B. Keterbatasan Penelitian	108
C. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Kabupaten Pasaman Barat	51
2. Daftar Skala Liker	55
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	54
4. Tabel Uji Coba Instrumen	59
5. Tingkat Pengembalian Kuesioner	68
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	70
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	71
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	72
10. Distribusi Frekuensi Keterandalan.....	73
11. Distribusi Frekuensi Ketepatanwaktuan.....	74
12. Distribusi Frekuensi Kualitas Sumberdaya manusia.....	75
13. Distribusi Frekuensi Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	76
14. Distribusi Frekuensi Pengendalian Intern Akuntansi.....	78
15. Uji Validitas Keterandalan.....	80
16. Uji Reabilitas Keterandalan.....	80
17. Uji Validitas Ketepatanwaktuan.....	81
18. Uji Reabilitas Ketepatanwaktuan.....	81
19. Uji Validitas Kualitas Sumberdaya Manusia.....	81
20. Uji Reliabilitas Kualitas Sumberdaya Manusia.....	82

21. Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	83
22. Uji Reabilitas Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	83
23. Uji Validitas Pengendalian Interen Akuntansi.....	84
24. Uji Reliabilitas Pengendalian Interen Akuntansi.....	84
25. Uji Normalitas Pengaruh X_1, X_2, X_3 Terhadap Y_1	85
26. Uji Normalitas Pengaruh X_1, X_2 , Terhadap Y_2	86
27. Uji Heteroskedastisitas untuk Hubungan X_1, X_2, X_3 terhadap Y_1 ...	87
28. Uji Heterokedastisitas untuk Hubungan X_1, X_2 terhadap Y_2	88
29. Uji Multikolinearitas Hubungan X_1, X_2, X_3 Terhadap Y_1	89
30. Uji Multikolinearitas Hubungan X_1, X_2 dan Y_2	90
31. Uji F Hitung untuk Model I.....	91
32. Uji F Hitung untuk Model II.....	91
33. Adjusted R Square untuk Model I.....	92
34. Adjusted R Square untuk Model II.....	93
35. Koefisien Regresi Berganda untuk Model I.....	94
36. Koefisien Regresi Berganda untuk Model II.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Izin Penelitian
2. Kuesioner Penelitian
3. Tabulasi Data Pilot Test
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test
5. Tabulasi Data Penelitian
6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian
7. Uji Asumsi Klasik
8. Uji Model
9. Uji Koefisien Determinasi
10. Uji t

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo,2006)

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaran pemerintah yang diatur dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya untuk meujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan

pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai (Suwardjono,2005). Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut dengan karakteristik kualitatif atau kualitas informasi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa kriteria kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005

berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintahan daerah kabupaten/ kota di Sumbar 2010 ternyata belum ada perbaikan dibandingkan tahun 2009, sehingga hasil penilaian oleh BPK masih tetap memberikan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kesalahan yang ditemukan tim BPK sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu masih ada juga perjalanan dinas fiktif. Misalnya ada tiket dan agenda perjalanan, tapi kenyataannya tidak. Kesalahan lainnya yaitu kesalahan penganggaran belanja, misalnya belanja modal dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Kemudian kesalahan inventaris/revaluasi aset terutama yang tidak masuk kelompok aset tetap, pengelolaan dan penatausahaan persediaan (Padang, Haluan. 2011).

Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selama tujuh tahun berturut- turut memperoleh opini *disclaimer*. Untuk itu Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat berupaya memperbaiki opini *disclaimer* yang diperoleh pada LKPD tahun sebelumnya, terbukti LKPD Kabupaten Pasaman Barat mampu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LKPD tahun 2010 dan 2011. Meski demikian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tetap berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menyusun LKPD sesuai dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, guna meningkatkan kualitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi target Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, Keterlambatan pencairan dana disebabkan adanya

kelambanan dalam membuat laporan penggunaan anggaran. Kebanyakan dinas, badan, kantor dan bagian di Kabupateb Pasaman Barat membuat laporan keuangan pada akhir tahun, yang mengakibatkan pencairan dana terlambat dan mengganggu program yang ada (koran-padang.com.2011).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan. Mengingat keterandalan dan ketepatanwaktuan informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Menurut Suwardjono,2005, keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Sedangkan ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, dibutuhkan sumberdaya manusia yang brkualitas dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Kemampuan sumberdaya

manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai. Teknologi informasi juga berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif karena pengambilan keputusan didasarkan dalam nilai informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan dapat dipahami. Selain itu komponen pengendalian atau kontrol juga diperlukan Untuk mencapai informasi yang andal. Komponen kontrol atau pengendalian akan menjaga sistem informasi dari kesalahan- kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Dengan adanya komponen kontrol dapat menunjang informasi menghasilkan informasi yang bernilai.

Hal pertama yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas sumberdaya manusia. Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Dalam acara sosialisasi program anti korupsi yang digelar BPKP Sumatera Barat untuk fokus group Bawasda, dijelaskan bahwa pada saat ini pemerintah dalam membuat laporan keuangan dari sisi sumberdaya manusia masih banyak bermasalah baik itu dari segi pertanggung jawaban sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan yang dihasilkan (Padang Ekspres). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan

Indriasari (2008) yang dilakukan pada pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Ilir, menyebutkan bahwa kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya manusia yang di milikinya.

Menurut Wahyono (2004:12) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan), disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilk dan sumberdaya yang menghasilkannya. Sumberdaya manusia yang pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Di sini kemampuan sumberdaya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan dan ketepatanwaktuan). Hal ini sejalan dengan komitmen di lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatra Barat dan Pemerintahan kabupaten/kota se-Sumatera Barat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, bernilai informasi, transparansi dan akuntabilitas.

Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Basis akuntansi yang diterapkan pun mengalami perubahan dari basis kas (*cash basis*) ke basis akrual (*accrual basis*). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*),

perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Oleh karena itu diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Menurut Jogiyanto (1995:41) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Menurut Jogiyanto (1995:18) informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto 2001:89).

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan didukung adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Akan tetapi selain sumberdaya manusia dan teknologi informasi tersebut ada hal penting lain yang harus diperhatikan yaitu pengendalian intern akuntansi. Pengendalian intern akuntansi berfungsi untuk mengatur tehnik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan pengendalian intern, laporan serta pengawasan. Fungsi pengendalian intern tersebut dapat membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan-batasan dan hak-hak dalam bekerja serta teknologi informasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaannya tersebut.

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif. Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu : (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintahan.

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi.

Penelitian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya oleh Indriasari (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumberdaya manusia di sub bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan

pelaporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan yang ada belum terurai dengan jelas. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa sumberdaya manusia di sub bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan yang ada di Pemerintahan Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN memiliki pengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan hasil kedua penelitian ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan mengangkat variabel-variabel tersebut diatas dengan judul penelitian yaitu : ***“ Pengaruh Kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintahan daerah “***.

Penelitian ini dilakukan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini terkait dengan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang pernah memperoleh opini *disclaimer* selama tujuh tahun berturut- turut, dan memperoleh opini WDP untuk LKPD tahun 2010 dan 2011. Pemberian opini

tersebut dari beberapa hal yang mempengaruhi kurangnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan daerah?
2. Sejauhmana pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintahan daerah?
3. Sejauhmana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan daerah?
4. Sejauhmana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintahan daerah?
5. Sejauhmana pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan daerah.

2. Pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintahan daerah.
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan daerah.
4. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintahan daerah.
5. Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak:

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangna kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerimtahan Daerah.

2. Bagi Akademisi

Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bidang Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna mengembangkan literatur ilmu akuntansi

4. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pelaporan Keuangan Pemerintah

a. Pengertian Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut suwardjono (2005) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam Statement Offinancial Accounting Concepts mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan.

Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Di Indonesia laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi : (1) laporan realisasi anggaran, (2) neraca, (3) laporan arus kas, dan (4) catatan atas laporan Keuangan. Tujuan pelaporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 2005 yaitu : a) Akuntabilitas, b) Transparan, c) manajemen, dan d) keseimbangan antar generasi.

b. Peran dan Tujuan Pelaporan keuangan Pemerintahan

1) Peran Pelaporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

2) Tujuan Pelaporan keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan sosial, ekonomi, maupun politik untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas, dana dan arus kas pemerintahan daerah, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah pemerintah periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan perundang- undangan
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi berkaitan pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

c. Manfaat Laporan keuangan Pemerintahan

Manfaat laporan keuangan pemerintah menurut GASB :

1. Membandingkan realisasi laporan keuangan dengan anggaran yang telah ditentukan
2. Menentukan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan keputusan yang berhubungan dengan keuangan
3. Mengetahui kondisi keuangan dan hasil operasi
4. Untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas.

d. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah

atau satuan organisasi lainnya jika menurut undang-undang satuan organisasi lainnya dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

e. Dasar hukum pelaporan keuangan

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang- Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
10. Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan

keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dan menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Akuntansi Keuangan Daerah akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah baik itu langsung maupun tidak langsung yg disebut sebagai pemakai laporan keuangan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengawasan Keuangan Rakyat, Pemerintah Pusat, dan Donatur.

2. Nilai Informasi

a. Pengertian Nilai Informasi

Menurut Suwardjono (2005:111) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Suwardjono (2005:165) agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Menurut Wahyono (2004:12) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan), disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumberdaya yang menghasilkannya. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau yang berlaku. Kemudian menyangkut kemampuan sumberdaya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengesah kemampuan di bidang akuntansi. Disini kemampuan sumberdaya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan).

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).

Pemanfaatan atau pengaplikasian teknologi informasi dalam organisasi juga mempunyai peran terhadap pembentukan nilai informasi pelaporan keuangan. Menurut Wahyono (2004:12) informasi yang dapat dipahami adalah informasi akuntansi yang dapat membantu dan berguna bagi pengambil

keputusan. Agar berguna bagi pengambil keputusan maka Informasi tersebut harus memiliki sifat relevan dan andal. Informasi yang relevan berarti memiliki sifat tepat waktu, memiliki nilai prediksi dan mampu diterapkan untuk keperluan review dan koreksi. Sedangkan menurut Jogiyanto (1995:41) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Komponen teknologi sistem komputer mempercepat proses transmisi data yang mana akan mendukung penciptaan proses nilai informasi.

Menurut Jogiyanto (1995:18) informasi merupakan proses dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif karena pengambilan keputusan didasarkan dalam nilai informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan dapat dipahami. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita pemerintah dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang kriteria kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat dalam pengambilan keputusan oleh semua pengguna dan stakeholder. Jogiyanto (1995:8) pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Wahyono (2004:12) kriteria lain yang dapat dipahami adalah keterandalan. Untuk mencapai informasi yang akurat diperlukan komponen

pengendalian atau kontrol. Komponen kontrol atau pengendalian akan menjaga sistem informasi dari kesalahan- kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Dengan adanya komponen kontrol dapat menunjang informasi menghasilkan informasi yang bernilai. Sehingga dapat di simpulkan bahwa kriteria nilai informasi keterandalan tidak dapat dipisahkan dari aspek atau lingkungan pengendalian. Sedangkan menurut Aren (2008) manajemen memiliki kewajiban dan kepentingan untuk melaksanakan pengendalian interen dalam hal menyiapkan laporan keuangan. Manajemen memiliki kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan misalnya prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut Suwardjono (2005:167) informasi dikatakan mempunyai nilai apabila informasi tersebut :

- 1) Menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa datang.
- 2) Menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian.
- 3) Mengubah keputusan atau perilaku para pemakai.

b. Unsur- unsur Nilai Informasi

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :
 - a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

3. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Arfianti, 2011). Menurut Wiley (2002) dalam Arfianti (2011) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumberdaya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Kapasitas sumberdaya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau sistem untuk melaksanakan fungsi- fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluhan- keluhan dan hasil. Tim GTZ & USAID/CLEAN Urban 2001 (dalam indriasari, 2008) kapasitas sumberdaya manusia adalah merupakan kemampuan baik dalam tingkat individu, organisasi atau kelembagaan maupun sistem untuk melaksanakan fungsi- fungsi akuntansi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan dalam melaksanakan fungsi ini terdiri dari :

- a) Bagian keuangan memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup
- b) Minimal staf subbagian keuangan/ akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi
- c) Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas
- d) Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah
- e) Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya
- f) Terdapat pedoman mengenai proses dan prosedur
- g) Telah melaksanakan proses akuntansi
- h) Memiliki sumberdaya pendukung operasi yang cukup
- i) Dilakukan pelatihan- pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dan tugas
- j) Adanya dana yang dianggarkan untuk memperoleh sumberdaya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-

pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Warsuko (dalam Harifan. 2009) kemampuan merupakan salah satu unsur penting dalam masalah manajemen dan kepemimpinan, yaitu: kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Kemampuan berhubungan dengan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja atau produktivitas tenaga kerja, dalam artian sejauh mana seseorang dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam kerja tergantung dari kecakapan atau kemampuan yang dimiliki.

Silalahi (dalam Harifan. 2009) menyatakan bahwa kemampuan kerja yang diistilahkan kematangan berkarya yang dihubungkan dengan interaksi manusia dengan peralatan, akan selalu berfluktuasi karena meliputi unsur-unsur tanggungjawab, kemampuan menetapkan sasaran yang tinggi tetapi terjangkau pengalaman dan pendidikan, kebiasaan hidup serta pandangan hidup. Sedangkan menurut Bagir (dalam Harifan. 2009) produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan latihan.

Pelatihan sebagai salah satu komponen dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu diberikan kepada tenaga kerja. Pelatihan akan memberikan dasar-dasar kerja secara fundamental atau mendasar dari suatu deskripsi kerja yang dibebankan. Pelatihan semacam ini lebih tepat disebut sebagai pelatihan teknik. Menurut Agus (dalam Harifan. 2009) pelatihan teknis merupakan upaya pembinaan keterampilan dasar yang diperlukan

pegawai baru atau lama untuk melaksanakan pekerjaan. Berkaitan dengan pengalaman kerja, lama waktu penugasan menentukan tingkat kualitas tenaga kerja itu yang mana ini mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia. Menurut widjajanto (2001:20) kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Pendidikan yang rendah dapat diisi oleh pengalaman yang panjang, sebaliknya pengalaman yang pendek dapat diisi oleh pendidikan yang sesuai dan panjang meskipun dalam beberapa jenis pekerjaan, pengalaman mutlak diperlukan unsur akhlak diperlukan untuk posisi- posisi jabatan yang berkaitan langsung dengan harta perusahaan, dan pucuk pimpinan yang berwenang dalam pengambilan keputusan.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Menurut Dunnetts dalam anonim, *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard & Thacker (2004) dalam Harifan (2009), *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Teknologi Informasi

1. Teknologi

Menurut Jugiyanto (1995:7) teknologi merupakan alat yang digunakan individu dalam menyelesaikan tugas mereka. Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (training, misalnya) yang memberikan pendukung penggunaan dalam penyelesaian tugas.

Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat konsisten serta reliable (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibandingkan dengan kemampuan manusia.

2. Informasi

Menurut Jugiyanto (1995) informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan menurut Davis (2002) dalam Harifan (2009) informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Menurut Mulyadi (11:1997) informasi merupakan suatu fakta, data pengamatan, persepsi atau suatu yang lain yang menambah pengetahuan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa informasi meliputi

unsur- unsur data, pengolahan data, menambah pengetahuan dan dasar pembuatan keputusan saat sekarang atau masa yang akan datang.

3. Teknologi Informasi

Nugroho (14:2001) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang menitik beratkan penggunaan komputer dan teknologi yang berhubungan dengan penyaluran sumber informasi. Selain itu teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan untuk memperoleh, memanipulasi, mengkomunikasikan, menyajikan dan memanfaatkan data.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Jugiyanto (12:1995) pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Menurut Jugiyanto (1995:7) bahwa aplikasi teknologi sangat berperan dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen.

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Hendriko (2009) pemanfaatan teknologi adalah tingkatan integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas- tugas akuntansi terdiri dari, yaitu :

- 1) Bagian akuntansi/keuangan memiliki Komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas

- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
- 3) Jaringan computer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- 5) Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari system informasi yang terintegrasi
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
- 8) Peralatan yang usang/ rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Menyangkut pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintahan, hal ini didasrakan kepada semakin meningkatnya total volume APBN/D dari tahun ketahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan volume frekuensi keuangan pemerintahan juga menunjukkan kualitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin kompleks dan rumit. Menurut Sugijanto dalam Indriasari (2008) peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintahan. Untuk itu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pembuatan pelaporan keuangan pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri Dalam

Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah. Sedangkan menurut Widjajanto (2001:89) secara umum pemanfaatan yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan.

Wahana komputer, 2003 (dalam indriasari, *et al*, 2008), pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kababilitas sistem. Pengkomputerisian sistem informasi akuntansi seringkali merubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi memungkinkan lebih sedikit kertas. Kebanyakan jika tidak semuanya, tahapan- tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis, output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN.

5. Pengendalian Intern Akuntansi

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2008 bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keterandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan. Pengendalian intern menurut Widjajanto (2001:18) adalah pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan atau organisasi bertujuan untuk : 1) mengamankan aktiva perusahaan, 2) mengecek kecermatan dan

ketelitian data akuntansi, 3) meningkatkan efisiensi, dan 4) mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.

Sedangkan menurut Arens (2008) sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan- kebijakan dan prosedur- prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi suatu usaha dapat dicapai. Salah satu tujuan dan sasaran manajemen yaitu menghasilkan laporan keuangan yang andal. Manajemen bertanggungjawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan, misalnya Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang membantu sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keterandalan laporan keuangan,

umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

b. Unsur- unsur Pengendalian Intern

Menurut Arens (2008:375) terdapat lima komponen pengendalian intern yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Komponen pengendalian intern meliputi hal- hal sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi : Integritas, Nilai Etika, Kompetensi personil perusahaan, Falsafah Manajemen dan gaya operasional, cara manajmene di dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan personil, serta, arahan yang diberikan oleh dewan direksi.

b. Penilaian Resiko

Pemilaian resiko atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan analisa resiko- resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani resiko guna mencapai tujuan entitas.

d. Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian intern secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

Sedangkan Mahmudi 2007 (dalam indriasari,*et al*,2008) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut.

a) Sistem dan prosedur akuntansi.

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi : (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

b) Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi

yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

c) Formulir, dokumen, dan catatan.

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d) Pemisahan tugas.

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, unsur atau elemen pengendalian intern terdiri dari yaitu :

- 1) Pasal 232 ayat 1 entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan
- 2) Sistem akuntansi keuangan daerah sebagaimana pada ayat 1 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer
- 3) Proses akuntansi didokumentasikan dalam bentuk jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambahkan dengan buku besar pembantu.
- 4) Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan pedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian intern dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
- 5) Kode rekening untuk menyusun neraca, laporan realisasi anggaran digunakan dan disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/ negara.
- 6) Semua transaksi dan kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- 7) Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/ atau kejadian keuangan.
- 8) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke buku besar dengan rekening

berkenaan. Buku besar ditutup dan diringkas pada akhir setiap periode sesuai dengan kebutuhan. Dan saldo setiap akhir periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

- 9) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 10) Adanya pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD antara pejabat penatausahaan keuangan SKPD, pejabat pelaksanaan teknik, dan bendahara pengeluaran.
- 11) Pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

c. Tujuan Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang yang dirancang untuk memberikan manajemen kapasitas yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dan proses ini sering kali disebut pengendalian, dan secara kolektif membantu pengendalian intern entitas tersebut. Menurut Arens (2008:370) menemukan bahwa manajemen dalam merencanakan sistem pengendalian intern memiliki tiga tujuan umum :

1. Reliabilitas pelaporan keuangan

2. Efisiensi dan efektifitas operasi
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

B. Penelitian Terdahulu.

Arfianti (2011) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum” (Studi Pada Blu Di Kota Semarang). Variabel independen yang digunakan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi. Variabel Dependen yang digunakan adalah Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan.

Harifan (2007) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Dengan variabel independen antara lain Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi, sedangkan variabel dependen adalah Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Indriasari (2008) meneliti tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)”. Variabel independen yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)”. Variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil dari

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kualitas sumberdaya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Arfianti, 2011). Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia subbagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan (Nazier, 2009 dalam Arfianti, 2010).

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H1 : Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggung jawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H2 : Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor

publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing* (Indriasari, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi *human error*, Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H4 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/ nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keterandalan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengendalian intern akuntansi dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H5 : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan perumusan masalah yang ada. Variabel yang akan diteliti terdiri dari Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen, Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi sebagai variabel independen.

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengiktisar dan melaporkan entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Sistem akuntansi sebagai suatu informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas sumberdaya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

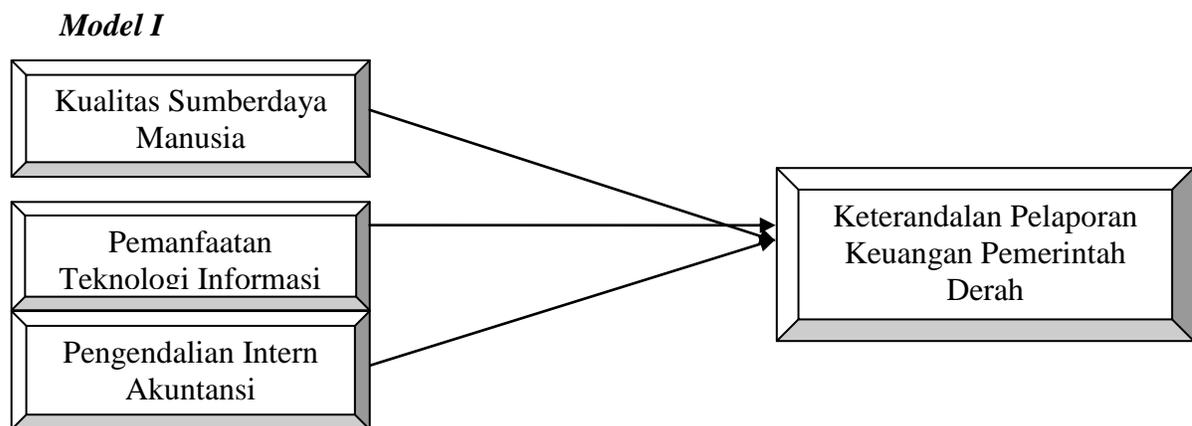
Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Sistem akuntansi sudah menjadi suatu kesatuan dari proses akuntansi, mulai dari akuntansi keuangan, audit dan saat ini sampai pada sistem

pengendalian sehingga akuntansi diharapkan mampu memproses serta menghasilkan data keuangan dan non keuangan menjadi suatu informasi yang dapat bernilai (keterandalan) untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi.

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyusun kerangka konseptual dari penelitian ini yang digambarkan pada gambar berikut ini:

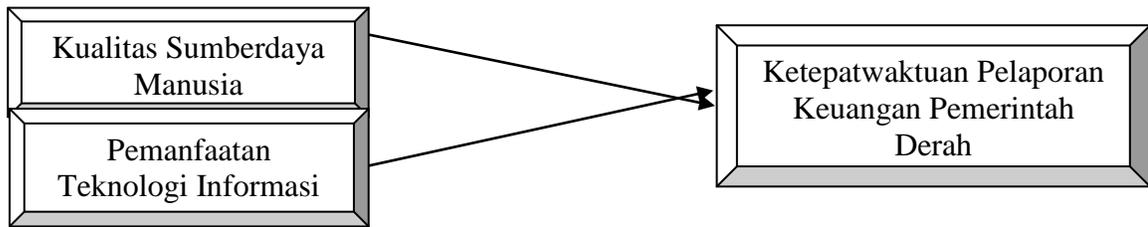
Gambar Kerangka Konseptual



Gambar 1

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern akuntansi, terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Model II



Gambar 2

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pengaruh kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan Pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumberdaya manusia maka semakin andal pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumberdaya manusia maka ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik pula.
3. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah . Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Pemanfaatan teknologi informasi maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.
4. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan

bahwa semakin baik Pemanfaatan teknologi informasi maka ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.

5. Pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian intern akuntansi maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini merupakan metode survei yang menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Adanya subjektivitas dari responden sehingga mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban dari responden.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, jadi belum terlihat secara menyeluruh aspek nilai informasi pelaporan keuangan daerah.
3. Penelitian ini masih terbatas pada kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan Pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, dengan nilai *Adjusted R Square* untuk Model I adalah 0,578 atau sebesar 57,8%, sedangkan 42,2% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dan nilai *Adjusted R Square*

untuk Model II adalah 0,142 atau sebesar 14,2% sedangkan 85,8% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti, sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Untuk peneliti selanjutnya, supaya dapat melengkapi metode survei penelitian ini dengan wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat mewawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan antara jawaban dikuesioner dan jawaban secara lisan untuk pertanyaan/ pernyataan yang sama, peneliti berikutnya juga dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel- variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, peneliti berikutnya agar memperluas cakupan penelitian, misalnya kabupaten dan kota lain di luar Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat sehingga bisa terlihat aspek nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh.
2. Bagi Instansi pemerintahan diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas kerjanya dalam hal pengelolaan keuangan dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan maupun individu didukung dengan pemanfaatan

teknologi informasi seoptimal mungkin dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang bernilai yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan, serta bermanfaat sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aren, A. Alvin. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Kedua Belas. Jakarta : Erlangga.
- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). 1999. *Concepts Statement No.1: Objectives Of Financial Reporting In Governmental Accounting Standards Board Series Statement No. 34: Basic Financial Statement And Management Discussion and Analysis For State and Local Government*. Norwalk
- Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah, Padang. *Skripsi Program S1*, Universitas Negeri Padang.
- Havesi, G. Alan. 2005. *Standars for Internal Control in New York State Governmant* .www.osc.state.ny.us.
- Indriasari, Desi. 2008. “Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah”. Pontianak : *jurnal SNA*.
- Jugiyanto, HM. 1995. *Analisis dan Desain System Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi Offies. Yogyakarta
- Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. “Pengaruh Faktor- Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 5 No.2 Hal.214
- Koran-padang. 2011. “BPK nilai laporan keuangan Pasbar WDP”. (koran-padang.com)
- Mardiasmo. 2006. Perwaju dan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.

Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. UPP STIM YKPN.

Mulyadi. 1997. Akuntansi Manajemen : *Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Padang Haluan. 2011. " Hasil Audit LKPD di Sumbar".

Pemerintahan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

-----, Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Negara.

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPF, Yogyakarta.

- Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi* :Analisis, Desain dan Pemograman Komputer. Yogyakarta :Andi.
- Winidyaningrum, Celviana. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi, Semarang. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Widjajanto, Nuroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval& Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essensial Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons.Inc.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Cindua Mato No. 13 Telp : (0753) 466546
Simpang Ampek – Pasaman Barat

REKOMENDASI

NO. 070/ 905 /KESBANGPOL/2012

TENTANG
IZIN PENELITIAN

Kami atas nama Bupati Pasaman Barat setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Nomor: 5872/UN.35.1.7/PP/2012, Tanggal 13 Oktober 2012, perihal Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud penelitian di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh:

Nama : **FADILA ARIESTA**
P : 2008/ 05336
Alamat : Jorong Kapa Selatan Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
Judul Penelitian : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akutansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Lokasi Penelitian : SKPD se-Kabupaten Pasaman Barat
Waktu Penelitian : Oktober 2012

dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan melakukan penelitian;
- 2 Memberitahukan pada pemerintah setempat;
- 3 Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat-istiadat masyarakat setempat;
- 4 Mengirimkan hasil kajian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Pasaman Barat c.q. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pasaman Barat;
- 5 Bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi akan dicabut kembali.

Demikian rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 12 Oktober 2012

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA KANTOR



YUDESRI, S.IP, M.Si
NIP. 19731210 199303 1 002

Disusun, disampaikan kepada Yth.:

- 1 Bpk. Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan);
- 2 Kepala SKPD se-Kabupaten Pasaman Barat di Pasaman Barat;
- 3 Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang di Padang;
- 4 Yang bersangkutan (FADILA ARIESTA).